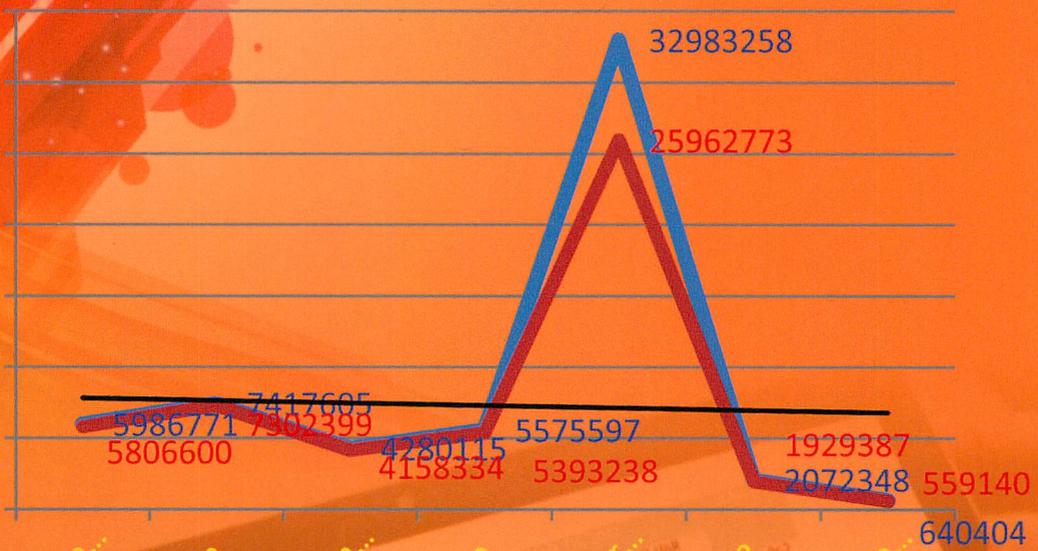


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**Badan PPSDMP
Tahun 2013**



	IMPOR	EKSPOR	MASUK DOMESTIK	MELURAI DOMESTIK	UMUM	Agro...
1 Pel. Tanjung Perak	6.116	461	2.137	34.421	41.805	
2 Bandara Juanda	1.660	3.587	3.147	10.173	13.320	
3 Pel. Ketapang-Banyuwangi				173	174	
4 Pel. Gresik				131	264	
5 Bandara Abd. Rahman S. Malang				487	1	488
6 Pel. Kaliburi-Situbondo				237	468	474
7 Pel. Kalibuntu-Prabalingga				6	67.806	86.303
8 Pel. S...				6.673		
9 JUMLAH						

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)
Kementerian Pertanian
Jakarta, 2014**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2013 harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, LAKIP Badan PPSDMP disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Tugas yang diemban oleh Badan PPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan tugasnya, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan.

Periode 2010-2014, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan

berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Badan PPSDMP menetapkan 4 (empat) misi. Program yang diemban adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Sejalan dengan visi dan misi, serta untuk mendukung 4 sukses sasaran strategis Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Badan PPSDMP menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2013, yaitu: (1) Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian; (2) Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian; (3) Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian; (4) Meningkatnya kompetensi tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda; (5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani; dan (6) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian.

Berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, nilai rata-rata capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar 98,95% (*output*). Kinerja Badan PPSDMP berada pada kisaran **88,02% hingga 113,68%**. Capaian kinerja terendah diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, sedangkan capaian kinerja tertinggi diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian.

Realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar **92,00%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi serapan tahun 2012, realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,72% (92,72% pada tahun 2012).

Tingkat efisiensi capaian indikator kinerja Badan PPSDMP berdasarkan proporsi *output/input* adalah sebesar **1,08** yang berarti berada pada **kategori efisien**. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dengan membandingkan nilai rata-rata capaian kinerja fisik (98,95%) dengan nilai rata-rata realisasi keuangan (92,00%).

Beberapa permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis Badan PPSDMP tahun 2013, adalah: (1) Rendahnya kompetensi widya-iswara dan ketenagaan pelatihan pertanian lainnya; (2) Belum optimalnya eselon I teknis lingkup Kementan dalam pemanfaatan UPT Pelatihan lingkup Badan PPSDMP; (3) Belum optimalnya pengembangan jejaring kerjasama lintas

sektor; (4) Minimnya sarana prasarana diklat; (5) Belum terselesaikannya *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) antara Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; (6) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) belum sesuai pedoman yang berlaku; (7) Pemberdayaan petani melalui metode Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) belum optimal dikarenakan belum optimalnya pengawalan dan pendampingan SL-PTT; dan (8) Kegiatan pengawalan dan pendampingan SL-PTT belum optimal dikarenakan mundurnya musim tanam akibat keterlambatan ketersediaan air dan benih.

Menyikapi kondisi tersebut, rekomendasi Badan PPSDMP sebagai langkah antisipasi yang harus dilakukan di tahun mendatang adalah: (1) Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui kegiatan pelatihan dan magang, baik dalam maupun luar negeri; (2) Sinkronisasi kegiatan pelatihan dengan Eselon I teknis lingkup Kementan dalam identifikasi diklat teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; (3) Pengembangan jejaring kerjasama lintas sektor melalui koordinasi dengan pemda dalam bentuk kegiatan apresiasi di wilayah kerja UPT Pelatihan Pertanian, kerjasama luar negeri melalui magang bagi petani muda di Jepang, *ASEAN exchange farmers*, *Training in Corn Production and Processing for ASEAN*, dan training bagi widyaiswara; (4) Pemenuhan anggaran prasarana dan sarana sesuai dengan standar minimal prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian, melalui kerjasama penyelenggaraan diklat, pendayagunaan ketenagaan diklat dan pemanfaatan sarana prasarana diklat; (5) Peningkatan sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dengan Eselon I teknis terkait dalam identifikasi kebutuhan latihan; (6) Perpanjangan MoU antara Menteri Pertanian (Kepala Badan PPSDMP) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Menengah) dalam bentuk kerjasama teknis Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP; (7) Peningkatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi BP3K kepada pelaksana/pengelola kegiatan fasilitasi BP3K; dan (8) Peningkatan koordinasi antara kabupaten (selaku pelaksana kegiatan) dengan provinsi (selaku satker pengelola dana dekonsentrasi); dan peningkatan koordinasi dengan dinas pertanian yang menangani SL-PTT guna percepatan penyediaan saprodi dan benih.

KATA PENGANTAR

Tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan, dengan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan; dan (d) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat Badan PPSDMP. Pada pelaksanaan di lapangan, Badan PPSDMP didukung oleh 78 Satker terdiri atas: 2 Satker di Pusat, 20 Satker UPT Pusat, 35 Satker Dekonsentrasi dan 21 Satker Tugas Pembantuan.

LAKIP Badan PPSDMP ini, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2013. Guna meningkatkan akuntabilitas, LAKIP Badan PPSDMP disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 tahun 2003; PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2010; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga LAKIP ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2014
Kepala Badan,



Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc.
NIP. 19590329198403 1002

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Organisasi dan Tata Kerja.....	2
D. Lingkungan Strategis Organisasi.....	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	19
C. Penetapan Kinerja.....	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Hasil Pengukuran Kinerja	31
B. Penilaian Pencapaian Kinerja.....	34
C. Analisis Kinerja.....	47
D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja	51
BAB IV. PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Sasaran dan Indikator Kinerja <i>Outcome</i> Badan PPSDMP Tahun 2010-2014.....	11
2. Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2011 s.d 2014	15
3. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2013.....	21
4. Penetapan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013....	26
5. Hasil Pengukuran Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013.....	32
6. Rekapitulasi Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013.....	37
7. Rekapitulasi Target dan Realisasi Peserta Diklat Teknis Bagi Non Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013	41
8. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2009 - 2013	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Hasil Pengukuran Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013	33
2. Persentase Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013	33
3. Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013	39
4. Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013	39
5. Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Fungsional Tahun 2013	40
6. Target dan Realisasi Peserta Diklat Teknis Bagi Non Aparatur Pertanian Tahun 2013	43
7. Persentase Capaian Kinerja Badan PPSDMP berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013	49
8. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2009 - 2013	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja Tahun 2013
2. Struktur Organisasi Badan PPSDMP Tahun 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2013 harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP, LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan PPSDMP selama tahun 2013, disusunlah LAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) Tahun 2013.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu:

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian;
- 2) Pusat Pelatihan Pertanian;
- 3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
dan
- 4) Sekretariat Badan PPSDMP.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Badan PPSDMP diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;

- b. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Informasi, meliputi subbidang: (1) Program dan Kerjasama; (2) Informasi dan Materi;
- b. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, meliputi subbidang: (1) Kelembagaan Penyuluhan; (2) Ketenagaan Penyuluhan;
- c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani, meliputi subbidang: (1) Kelembagaan Petani; (2) Usahatani; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama, meliputi subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
- b. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan, meliputi subbidang: (1) Kelembagaan Pelatihan; (2) Ketenagaan Pelatihan; dan

- c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, meliputi subbidang: (1) Sistem dan Metode; (2) Evaluasi Penyelenggaraan;

3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- b. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan
- c. Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri atas 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama, meliputi subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
- b. Bidang Pendidikan, meliputi subbidang: (1) Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan; dan
- c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, meliputi subbidang: (1) Standardisasi Kompetensi; (2) Sertifikasi Profesi.

4) Sekretariat Badan PPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Pada pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan PPSDMP.

Struktur organisasi Sekretariat Badan PPSDMP terdiri atas 4 Bagian, 12 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. Bagian Perencanaan, meliputi subbagian: (1) Program dan Kerjasama; (2) Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian; dan (3) Anggaran;
- b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, meliputi subbagian: (1) Perbendaharaan; (2) Akuntansi dan Verifikasi; serta (3) Perlengkapan;
- c. Bagian Umum, meliputi subbagian: (1) Hukum dan Organisasi; (2) Kepegawaian; dan (3) Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meliputi subbagian: (1) Evaluasi; (2) Pelaporan; dan (3) Hubungan Masyarakat; serta
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi Badan PPSDMP terdiri atas lingkungan strategis internal dan eksternal. Lingkungan strategis internal, yaitu kekuatan (*strength*) yang dimiliki Badan PPSDMP dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian tahun 2013 meliputi:

1. Tingkat Pusat didukung oleh 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP. Pelaksanaan di lapangan didukung oleh 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 35 Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi

(Dinas/Badan), serta 21 Satker Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

2. Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.290 orang aparat (data sampai dengan 31 Desember 2013), yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 347 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.943 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan terdiri atas: golongan I sebanyak 161 orang; golongan II sebanyak 630 orang; golongan III sebanyak 1.186 orang, dan golongan IV sebanyak 313 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 55 orang, S2 (magister) sebanyak 440 orang, S1/D4 (sarjana/diploma) sebanyak 799 orang, S0 (D1-D3) sebanyak 102 orang, SLTA sebanyak 647 orang, SLTP sebanyak 96 orang dan SD sebanyak 151 orang. Badan PPSDMP juga didukung oleh sarana prasarana dan anggaran yang cukup memadai.

Lingkungan internal organisasi yang merupakan kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian yang dirasakan hingga saat ini meliputi:

1. Terbatasnya dan belum meratanya kesempatan pengembangan kemampuan bagi petugas; dan
2. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang merupakan peluang (*opportunities*) dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:

1. Keberadaan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan. Lembaga pendidikan meliputi: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) sebanyak 6 unit, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) sebanyak 3 unit. Lembaga pelatihan sebanyak 10 Balai. Badan PPSDMP juga didukung oleh lembaga penyuluhan pertanian di daerah milik petani seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebanyak 876 unit, Kelompok Tani (Poktan) sebanyak 307.309 Poktan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

sebanyak 37.013 gapoktan, dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3 model) sebanyak 125 unit yang merupakan binaan Badan PPSDMP.

2. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah meliputi Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 28.462 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian sebanyak 21.249 orang, dan Penyuluh Swadaya sebanyak 8.344 orang;
3. Dukungan atau *sharing* pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
4. Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
5. Dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui program: (a) *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology* (FEATI), dan (b) *Rural Empowerment and Agricultural Development Program* (READ).

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang berupa tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian meliputi:

1. Mayoritas sumber daya manusia pertanian (petani) memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah;
2. Berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian;
3. Lemahnya aksesibilitas petani terhadap lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber informasi/teknologi; dan
4. Kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2010-2014 (revisi) ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan PPSDMP yang disesuaikan dengan perubahan organisasi di tingkat Kementerian Pertanian.

1. Visi

Visi Badan PPSDMP tahun 2010-2014 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi organisasi, Badan PPSDMP menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

- a. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu;
- b. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi;
- c. Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; dan
- d. Memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah:

- a. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani;
- b. Meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian;
- c. Menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi; dan

d. Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan PPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah:

- a. Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani;
- b. Meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian;
- c. Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani;
- d. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi; dan
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan PPSDMP yang akuntabel.

Rincian sasaran strategis dan indikator kinerja *outcome* Badan PPSDMP selama tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 1, sedangkan target sasaran Badan PPSDMP tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Outcome
Badan PPSDMP Tahun 2010-2014**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Outcome
1.	Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya penyuluhan pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun. 2. Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan rencana. 4. Terlegitimasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah. 5. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. 6. Teraplikasikannya sistem informasi penyuluhan pertanian bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani di 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota. 7. Tersedianya bahan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi. 8. Meningkatnya jejaring kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri. 9. Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian oleh 2.500 BPP. 10. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun berikutnya. 11. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan di 33 provinsi dan 250 kabupaten/kota, 12. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan di 3.000 kecamatan dan 28.304 desa/kelurahan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>
		<ol style="list-style-type: none"> 13. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan di 522 kecamatan (BPP Model). 14. Meningkatnya efektifitas pelayanan Pusluhdes di 28.304 desa/kelurahan. 15. Meningkatnya kinerja 24.608 THL-TBPP. 16. Meningkatnya kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS. 17. Meningkatnya kompetensi dan kinerja 330 Penyuluh Pertanian Swadaya/ Swasta. 18. Tersedianya bahan masukan untuk pengambilan kebijakan penyuluhan pertanian. 19. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun berikutnya. 20. Meningkatnya kapasitas 28.304 kelembagaan petani dan usaha tani (Gapoktan). 21. Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan. 22. Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan. 23. Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada 3.000 kelompok. 24. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani/Gapoktan di 68 kabupaten pada 18 provinsi sasaran FEATI.
2.	<p>Meningkatnya kapasitas 108.855 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian. Serta Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kredibilitas 290 Widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan. 2. Meningkatnya kredibilitas 1.792 orang instruktur P4S. 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan di 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah. 4. Meningkatnya kualitas 108.825 aparatur pertanian. 5. Meningkatnya kapasitas 97.814 petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan agribisnis. 6. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pelatihan oleh 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 14 program pelatihan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>
		<p>pertanian sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.</p> <p>8. Meningkatnya citra pemerintah RI di dunia internasional di bidang pelatihan pertanian.</p> <p>9. Meningkatnya kredibilitas 29 kelembagaan pelatihan pertanian Pusat dan Daerah.</p> <p>10. Meningkatnya kredibilitas 891 kelembagaan P4S.</p> <p>11. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian pada 10 UPT pelatihan Pusat.</p> <p>12. Meningkatnya aksesibilitas dan kemandirian petani di 150 desa pada 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.</p>
3.	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.	<p>1. Terselenggaranya pendidikan tinggi kedinasan di 6 STPP yang akuntabel dan sesuai standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat fungsional RIHP dan Karantina yang kompeten.</p> <p>3. Terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan 6 STPP.</p> <p>4. Meningkatnya profesionalisme 210 Dosen STPP.</p> <p>5. Meningkatnya kualifikasi 2.500 orang aparatur pertanian di bidang RIHP dan perkarantinaan pertanian.</p> <p>6. Meningkatnya kualifikasi pendidikan dan kinerja 1.000 aparatur pertanian.</p> <p>7. Meningkatnya kualitas program pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.</p> <p>8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.</p> <p>9. Terlaksananya sertifikasi profesi bagi 5.000 penyuluh pertanian dan 750 non-penyuluh pertanian.</p> <p>10. Meningkatnya kualitas 300 asessor kompetensi bidang pertanian.</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Terselenggaranya diklat profesi di 10 Lembaga DiklatProfesi (LDP). 12. Terselenggaranya uji kompetensi di 10 Tempat Uji Kompetensi (TUK). 13. Tersusunnya sertifikasi profesi bidang pertanian untuk 30 unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 14. Meningkatnya profesionalisme 300 orang Guru dan 150 orang tenaga kependidikan SMK-PP. 15. Meningkatnya kualitas program pendidikan menengah pertanian. 16. Terselenggaranya pendidikan di 71 unit SMK-PP sesuai standar nasional pendidikan. 17. Meningkatnya kualitas lulusan dari 71 SMK-PP. 18. Menguatnya eksistensi 71 unit SMK-PP. 19. Tersedianya 70.000 tenaga kerja bidang pertanian yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan muda pertanian.
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja Badan PPSDMP (Pusat) dan 19 UPT Pusat di bidang pelayanan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan. 2. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kegiatan Badan PPSDMP. 3. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan perlengkapan Badan PPSDMP. 4. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Badan PPSDMP. 5. Meningkatnya pelayanan kehumasan untuk membangun citra positif Badan PPSDMP.

**Tabel 2. Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan PPSDMP
Tahun 2011 s.d 2014**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian	1. Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	18.138	24.443	26.327	29.312
	2. Meningkatnya kapasitas non aparatur di sektor pertanian (orang)	19.080	22.205	22.205	24.014
	3. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan (orang)	36.000	55.458	55.458	72.000
	4. Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian (orang)	1.050	4.429	4.429	5.029
	5. Tersedianya tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda di sektor pertanian (orang)	10.000	16.248	16.248	16.248
	6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani (unit)	38.474	51.763	51.704	72.170
	7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah (unit)	512	2.088	2.088	2.088

5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang ditetapkan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014 meliputi:

- a. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat;
- b. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan;
- c. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian;
- d. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri;
- e. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten;
- f. Peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian;
- g. Pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten; dan
- h. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Mengacu pada kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka **strategi** yang ditempuh untuk mencapai

sasaran, tujuan, misi dan visi pada periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat;
- b. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan;
- c. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta;
- d. Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan berdayasaing;
- e. Penataan serta peningkatan kompetensi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian;
- f. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel;
- g. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non-aparatur pertanian;
- h. Peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana kelembagaan pelatihan pertanian;
- i. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani (P4S);
- j. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian;
- k. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian;
- l. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian;
- m. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian;

- n. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian;
- o. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian;
- p. Pemantapan sistem perencanaan;
- q. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan
- r. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

6. Program dan Kegiatan

Program berbasis kinerja yang diemban oleh Badan PPSDMP periode 2010-2014 adalah ***Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani***. Mengacu pada program tersebut, maka kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2013 meliputi kegiatan:

- a. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, terdiri atas kegiatan: (1) pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian, (2) pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, (3) pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani, dan (4) penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola oleh petani pada lokasi Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/P3TIP atau *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FEATI Project)*;
- b. Pemantapan sistem pelatihan pertanian, meliputi kegiatan: (1) pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian; (2) peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; (3) peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (4) pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian; dan (5) pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan melalui Program Pengembangan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan atau *Rural*

Empowerment and Agricultural Development (READ Programe);

- c. Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, terdiri atas kegiatan: (1) peningkatan kualitas pendidikan pertanian; (2) pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian; (3) pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi; (4) pengembangan program dan kerjasama pendidikan menengah pertanian;
- d. Dukungan administrasi manajemen dan teknis lainnya, terdiri atas: pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan; pemantapan sistem perencanaan; pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; serta pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan PPSDMP tahun 2013 merupakan bagian dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Dokumen RKT ini memuat program dan kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan oleh Badan PPSDMP pada tahun 2013.

Mengacu pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2010-2014, Program yang diemban oleh Badan PPSDMP Tahun 2013 adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Sasaran strategis Badan PPSDMP yang tertuang dalam RKT tahun 2013 adalah meningkatkan kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian.

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Badan PPSDMP tahun 2013, untuk mencapai sasaran strategis meliputi: (1) Revitalisasi Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;

(2) Pengembangan Pendidikan menengah; (3) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; dan (5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Secara rinci, program, sasaran strategis, indikator kinerja dan target Badan PPSDMP tahun 2013 yang tertuang dalam RKT Badan PPSDMP Tahun 2013 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2013

Program dan Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Meningkatkan kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian.	1. Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	26.327
		2. Meningkatnya kapasitas non aparatur di sektor pertanian (orang)	22.205
		3. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan (orang)	55.458
		4. Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian (orang)	4.429
		5. Tersedianya tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda di sektor pertanian (orang)	16.248
		6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani (unit)	51.704
		7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah (unit)	2.088
1. Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	1. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian melalui standarisasi dan sertifikasi profesi	1. Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang distandarisasi (SKKNI)	1
		2. Jumlah penyuluh pertanian yang mendapat sertifikasi profesi (orang)	1.400
	2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan pertanian	1. Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya (unit)	6
		2. Jumlah ketenagaan pendidikan kedinasan yang ditingkatkan kualitasnya (orang)	3.180
	3. Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan pertanian (pendidikan kedinasan dan tugas belajar)	1. Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti jenjang pendidikan kedinasan yang sesuai standar kompetensinya (orang)	2.825
		2. Jumlah aparatur yang mengikuti jenjang pendidikan formal S2 dan S3 (orang)	204

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2013 (Lanjutan)

Progam dan Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		3. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	107
		4. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12
2. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian	Meningkatnya tingkat pendidikan menengah pertanian	1. Jumlah generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan di SMK-SPP (orang)	16.248
		2. Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	9
		3. Jumlah ketenagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (orang)	241
		4. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan menengah (Dok)	59
		5. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12
3. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan pelatihan pertanian	1. Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	29
		2. Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya (unit)	170
		3. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (orang)	1.277
		4. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Dok)	258

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2013 (Lanjutan)

Program dan Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		5. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12
	Meningkatnya kualitas aparatur dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian (orang)	25.050
		2. Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)	22.205
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal (READ Program)	Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya (desa)	150
4. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang difasilitasi (Bakorluh, Bapeluh, BPP) (unit)	2.044
	Meningkatnya jumlah kelembagaan petani	Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (gapoktan/poktan) (Unit)	51.534
	Meningkatnya kualitas program dan materi penyuluhan pertanian	1. Jumlah dokumen program, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (judul)	4.369
		2. Jumlah dokumen kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Dok)	247
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian	Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (orang)	55.458

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2013 (Lanjutan)

Program dan Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, dan manajemen organisasi PPSDMP melalui pemantapan system perencanaan, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, monev serta ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan	1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan program penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian (Dok)	91
		2. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12

C. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan PPSDMP untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja ini dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk: (a) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; (b) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP; dan (c) Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2013 dan merupakan tindak lanjut Rencana Kinerja Tahunan yang telah mendapatkan anggaran dalam DIPA tahun 2013. Penetapan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013 ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan PPSDMP dan ditetapkan pada bulan April 2013. Pada Penetapan Kinerja Tahun 2013, Badan PPSDMP menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian;
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian;
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian;
4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda (meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian);
5. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani dengan indikator kinerja kapasitas kelembagaan petani; dan
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian.

Untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis Badan PPSDMP, maka pada tahun 2013 Badan PPSDMP menetapkan 7 indikator kinerja dan target yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Penetapan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kompetensi aparatur di sektor pertanian ➤ Kompetensi non aparatur di sektor pertanian 	19.043 orang 16.528 orang
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian 	49.282 orang
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kompetensi aparatur fungsional pertanian 	2.676 orang
4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda (meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kompetensi tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian 	18.403 orang
5. Meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani 	10.556 unit
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian 	3.028 unit

Jumlah Anggaran Badan PPSDMP di bawah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2013 (pagu awal) sebesar Rp1.434.295.529.000,-. Adanya kebijakan penghematan anggaran, pagu anggaran mengalami revisi menjadi Rp1.341.652.283.000,-.

Target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur di sektor pertanian, target sebanyak 19.043 orang, terdiri atas :
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Tanaman Pangan, target 3.540 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Perkebunan, target 1.170 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Peternakan, target 2.940 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Hortikultura, target 1.530 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Ketahanan Pangan, target 809 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil, target 840 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, target 1.770 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, target 300 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Statistik Pertanian/ Peternakan, target 3.414 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Lainnya, target 780 orang.
 - Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional RIHP bagi Penyuluh Pertanian, Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Bibit Ternak (PBT), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analisis Pasar, target 1.950 orang.
2. Kompetensi non aparatur di sektor pertanian, target sebanyak 16.528 orang, terdiri atas:

- Non aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Tanaman Pangan, target 2.430 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Perkebunan, target 780 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Peternakan, target 1.110 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Hortikultura, target 840 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Ketahanan Pangan, target 468 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil, target 330 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat *Agrary Training Camp (ATC)*, target 330 orang.
 - Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian, target 1.760 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, target 30 orang.
 - Non aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), target 8.450 orang.
3. Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian melalui fasilitasi honor dan BOP bagi penyuluh PNS dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, target 49.282 orang.
4. Kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui fasilitasi pendidikan tinggi pertanian (pendidikan tinggi kedinasan D4) di 6 (enam) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) lingkup Badan PPSDMP, target sebanyak 2.676 orang, rincian sebagai berikut:
- Aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP Bogor, target 386 orang.
 - Aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP Gowa, target 407 orang.

- Aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP Magelang (Jurusan Penyuluhan Peternakan), target 200 orang.
 - Aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta, target 221 orang.
 - Aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP Malang, target 595 orang.
 - Aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP Manokwari, target 524 orang.
 - Aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP Medan, target 343 orang.
5. Kompetensi tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian melalui fasilitasi pendidikan menengah pertanian di SMK-PP (SMK-PP) pada program studi penyuluhan pertanian, penyuluhan perkebunan, peternakan, pangan dan hortikultura, target sebanyak 18.403 orang siswa, rincian sebagai berikut:
- Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP Banjarbaru, target 396 orang.
 - Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP Sembawa, target 450 orang.
 - Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP Kupang, target 462 orang.
 - Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di 70 SMK-PP milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang mendapatkan fasilitas bantuan sosial untuk praktek siswa, target 17.095 orang.
6. Kapasitas kelembagaan petani, target sebanyak 10.556 unit, terdiri atas: (a) kelompok tani (Poktan), target 10.240 unit; (b) Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), target 316 unit.
7. Kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian melalui fasilitasi kelembagaan penyuluhan, kelembagaan

pelatihan, kelembagaan pendidikan tinggi, kelembagaan pendidikan menengah, target 1.644 unit. Lembaga pemerintah di bidang SDM pertanian yang difasilitasi terdiri atas:

3. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/ Badan Koordinasi Penyuluhan, target 33 unit.
4. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/ kota/Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, target 497 unit.
5. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan/ Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), target 1.023 unit.
6. Kelembagaan UPT Pelatihan Pertanian, target 10 unit.
7. Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, target 1 unit.
8. Kelembagaan UPT Pendidikan Pertanian, target 7 unit.
9. Kelembagaan pendidikan menengah pertanian, target 73 unit, yaitu 3 unit SMK-PP lingkup Badan PPSDMP dan 70 unit SMK-PP milik Pemda.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Badan PPSDMP sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung 4 (empat) sukses sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2013, melalui Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2013 dan pada akhir tahun 2013 dilakukan pengukuran kinerja.

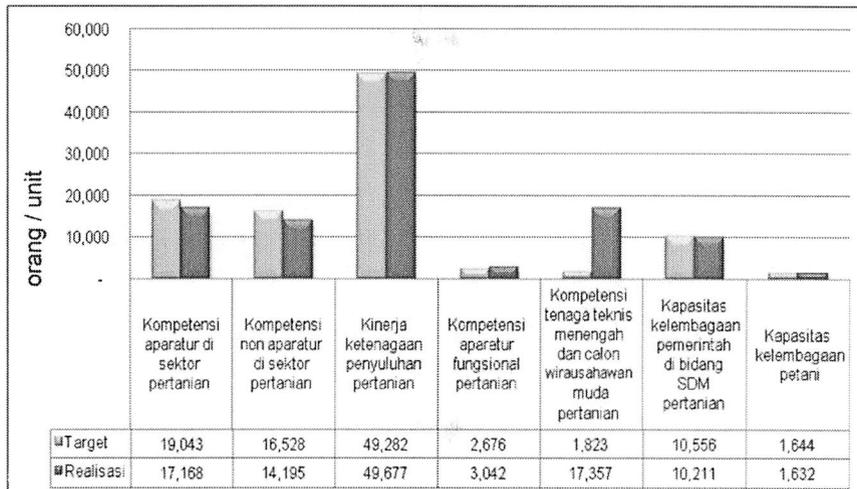
Pengukuran kinerja merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja dalam Penetapan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2013.

Berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, nilai rata-rata capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar 98,95% (*output*). Kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 berada pada **kisaran 88,02% hingga 113,68%**. Capaian kinerja terendah diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, sedangkan capaian kinerja tertinggi diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian. Secara rinci, hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 pada masing-masing sasaran strategis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013

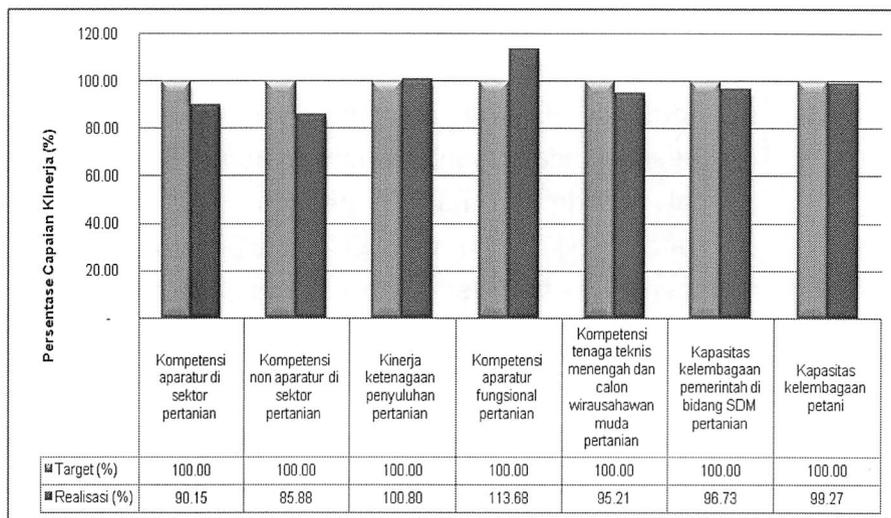
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	➤ Kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	19.043	17.168	90,15
	➤ Kompetensi non aparatur di sektor pertanian (orang)	16.528	14.195	85,88
				Rata-rata: 88,02
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	➤ Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian (orang)	49.282	49.677	100,80
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian	➤ Kompetensi aparatur fungsional pertanian (orang)	2.676	3.042	113,68
4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda (meningkatkan kompetensi peserta didik menengah pertanian)	➤ Kompetensi tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian (orang)	18.230	17.357	95,21
5. Meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani	➤ Kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani (unit)	10.556	10.211	96,73
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian	➤ Kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian (unit)	1.644	1.632	99,27
Nilai rata-rata capaian kinerja Badan PPSDMP		98,95		

Hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP tahun 2013, secara grafik disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Pengukuran Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013

Persentase capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013

B. Penilaian Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013, maka pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian

Peningkatan kompetensi aparatur dan nonaparatur pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada (kedelai, gula, daging sapi/kerbau) dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Capaian indikator kinerja kompetensi aparatur di sektor pertanian sebesar **90,15%** (target 19.043 orang, terealisasi 17.168 orang). Capaian indikator kinerja kompetensi non aparatur di sektor pertanian sebesar 85,88% (target 16.528 orang, terealisasi 14.195 orang). Capaian indikator kinerja kompetensi aparatur dan non aparatur di sektor pertanian tidak mencapai target disebabkan:

- a) Jumlah peserta diklat tidak mencapai target, karena:
 - (1) terdapat peserta pelatihan yang mengundurkan diri,
 - (2) peserta tidak mendapatkan rekomendasi dari instansi tempat peserta bekerja, (3) peserta diklat tidak memenuhi persyaratan diklat, (4) instansi calon peserta pelatihan tidak memberikan respon terhadap undangan pelatihan, (5) belum sinkronnya data Pejabat Fungsional RIHP di daerah dengan data pada sekretariat pembina jabatan fungsioanal RIHP.
- b) Kebijakan penghematan anggaran mengakibatkan penurunan target jumlah peserta pelatihan dan realokasi pelatihan aparatur menjadi pelatihan non aparatur.

Peningkatan kompetensi bagi aparatur pertanian dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan diklat fungsional RIHP, sedangkan peningkatan kompetensi bagi non aparatur pertanian dilakukan melalui diklat teknis.

Pelatihan diselenggarakan di 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat lingkup Badan PPSDMP yaitu: (1) Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi; (2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara; (3) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang; (4) BBPP Ketindan; (5) BBPP Batu; (6) BBPP Binuang; (7) BBPP Batang Kaluku; (8) BBPP Kupang; (9) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi; dan (10) BPP Lampung.

Penyelenggaraan diklat bagi aparatur non aparatur juga dialokasikan di UPTD Pemda (eks UPT Pelatihan) di 17 provinsi yaitu:

- (1) Provinsi Riau;
- (2) Provinsi Sumatera Selatan;
- (3) Provinsi Sumatera Utara;
- (4) Provinsi Kalimantan Barat;
- (5) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (6) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (7) Provinsi Jawa Barat;
- (8) Provinsi Jawa Tengah (Balai Diklat Pertanian Ungaran dan Balai Diklat Soropadan);
- (9) Provinsi Sulawesi Utara;
- (10) Provinsi Aceh;
- (11) Provinsi Maluku;
- (12) Provinsi Sumatera Barat;
- (13) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (14) Provinsi Jawa Timur;
- (15) Provinsi Bengkulu;
- (16) Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- (17) Provinsi Kalimantan Timur.

Peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelatihan yang memuat materi terkait dengan dukungan terhadap empat sukses pembangunan pertanian yaitu:

10. Swasembada dan swasembada berkelanjutan, meliputi Diklat Teknis Agribisnis Jagung, Kedelai, Padi, Tebu, Sapi Potong, dan Hortikultura;
11. Diversifikasi pangan, meliputi Diklat Teknis Diversifikasi Pangan dan Diklat Teknis Mandiri Pangan;
12. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, melalui Diklat Teknis Agribisnis Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
13. Peningkatan kesejahteraan petani, melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan/PUAP dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat/LM3, meliputi Diklat bagi pengelola Gapoktan dan Diklat bagi Pengelola LM3.

Rekapitulasi target dan realisasi peserta diklat bagi aparatur pertanian berdasarkan jenis diklat, secara rinci disajikan pada Tabel 6. Rekapitulasi target dan realisasi peserta diklat bagi non aparatur pertanian berdasarkan jenis diklat, secara rinci disajikan pada Tabel 7.

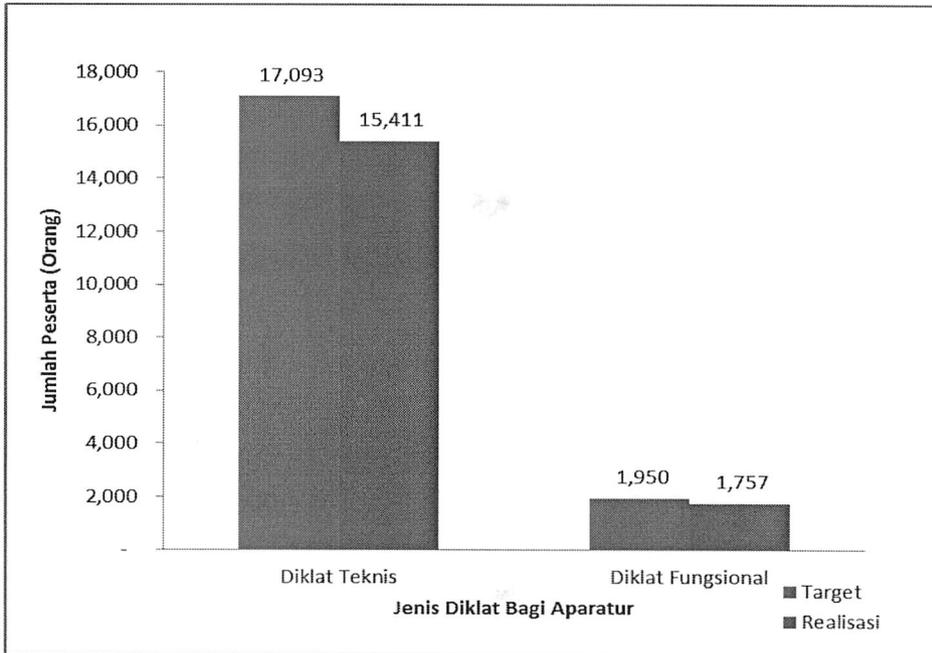
Tabel 6. Rekapitulasi Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013

No.	Jenis Diklat	Rencana (Orang)	Realisasi (Orang)	%
A.	Diklat Teknis	17.093	15.411	90,16
1.	Tanaman Pangan	3.540	3.173	89,63
	a. Diklat Teknis Agribisnis Jagung	570	958	168,07
	b. Diklat Teknis Agribisnis Kedelai	900	561	62,33
	c. Diklat Teknis Agribisnis Padi	1.290	1.243	96,36
	d. Diklat Teknis Tanaman Pangan Lainnya	780	411	52,69
2.	Perkebunan	1.170	929	79,40
	a. Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan Lainnya	510	630	123,53
	b. Diklat Teknis Agribisnis Tebu	660	299	45,30
3.	Peternakan	2.940	2.412	82,04
	a. Diklat Teknis Peternakan	900	1.621	180,11
	b. Diklat Teknis Sapi Potong	2.040	791	38,77
4.	Hortikultura	1.530	1.495	97,71
	a. Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura	1.530	1.495	97,71
5.	Ketahanan Pangan	809	741	91,59
	a. Diklat Teknis Diversifikasi Pangan	497	482	96,98
	b. Diklat Teknis Desa Mandiri Pangan	312	259	83,01
6.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	840	1.003	119,40
	a. Diklat Teknis Agribisnis Pengolahan dan Pemasaran Hasil	840	1.003	119,40
7.	Diklat Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	1.770	1.618	91,41
8.	Diklat Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	300	267	89,00

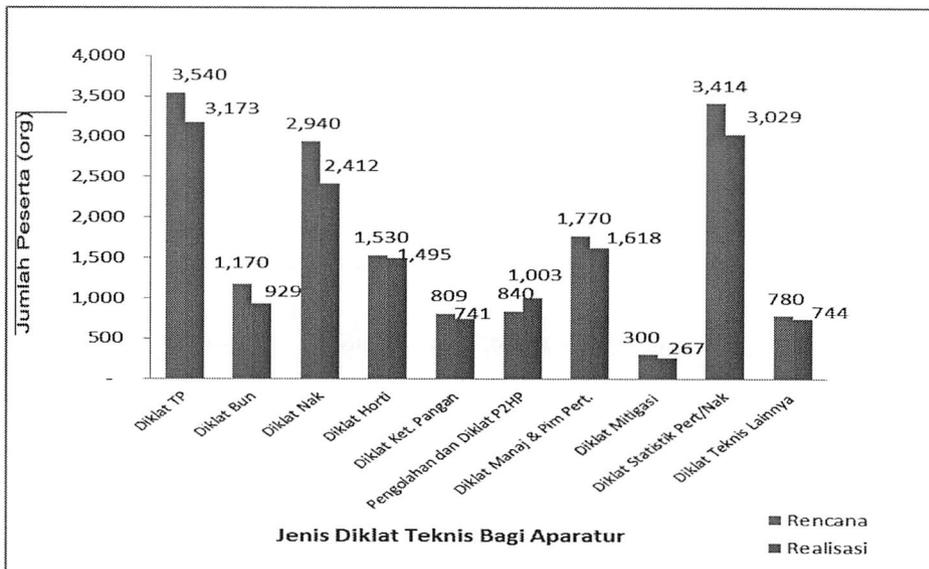
Tabel 6. Rekapitulasi Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013 (Lanjutan)

No.	Jenis Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%
9.	Diklat Statistik Pertanian/ Peternakan	3.414	3.029	88,72
10.	Diklat Teknis Lainnya	780	744	95,38
B.	Diklat Fungsional	1.950	1.757	90,10
1.	Diklat Fungsional RIHP	1.950	1.757	90,10
a.	Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian	1.050	1.251	119,14
b.	Diklat Fungsional POPT	150	70	46,67
c.	Diklat Fungsional Pengawas Benih Tanaman	120	58	48,33
d.	Diklat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	120	25	20,83
e.	Diklat Fungsional Medik Veteriner	120	89	74,17
f.	Diklat Fungsional Paramedik Veteriner	120	90	75,00
g.	Diklat Fungsional Pengawas Bibit Ternak	90	85	94,44
h.	Diklat Fungsional Pengawas Mutu Pakan	120	89	74,17
i.	Diklat Fungsional Analisis Pasar	60	0	0,00
Total (A + B)		19.043	17.168	90,15

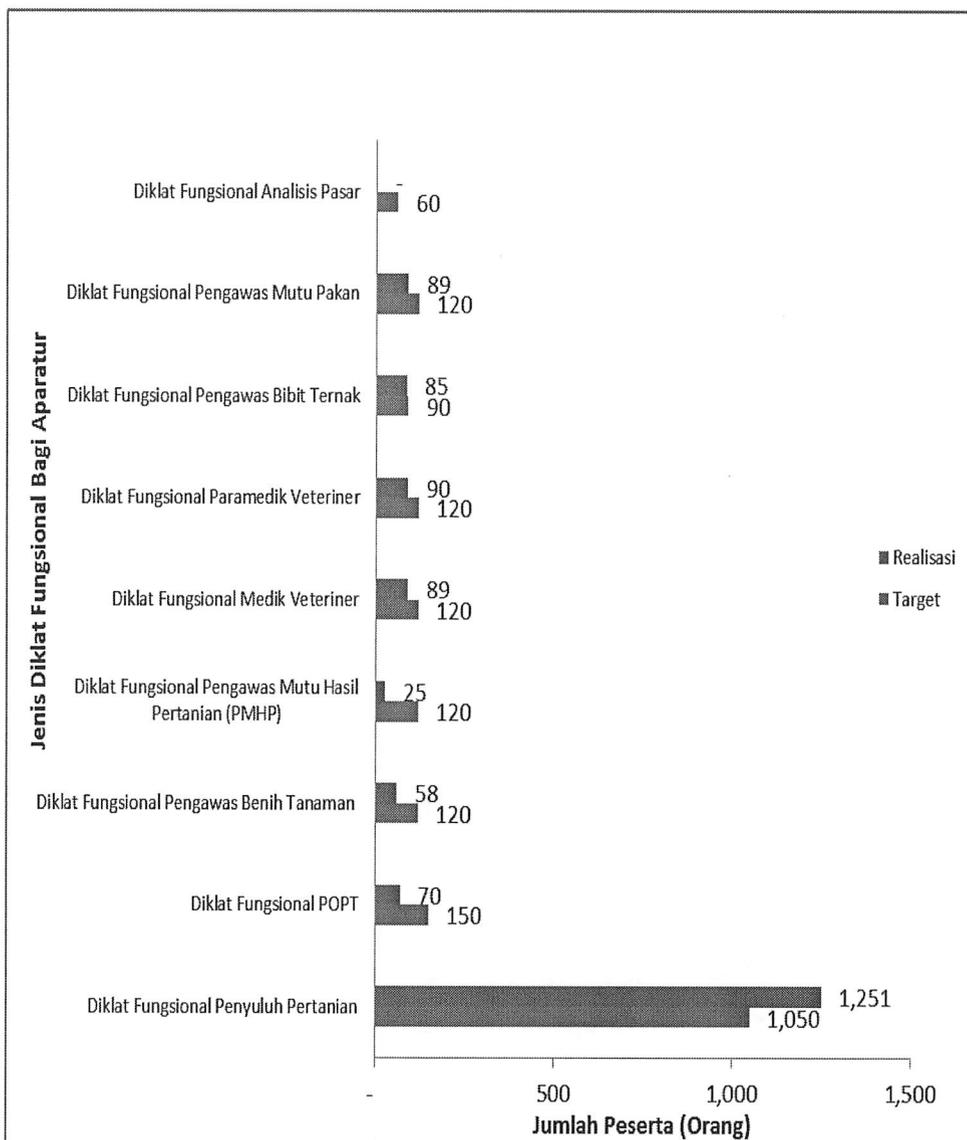
Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013, ditampilkan secara grafik pada Gambar 3, 4, 5.



Gambar 3. Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013



Gambar 4. Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013



Gambar 5. Target dan Realisasi Peserta Diklat Bagi Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Fungsional Tahun 2013

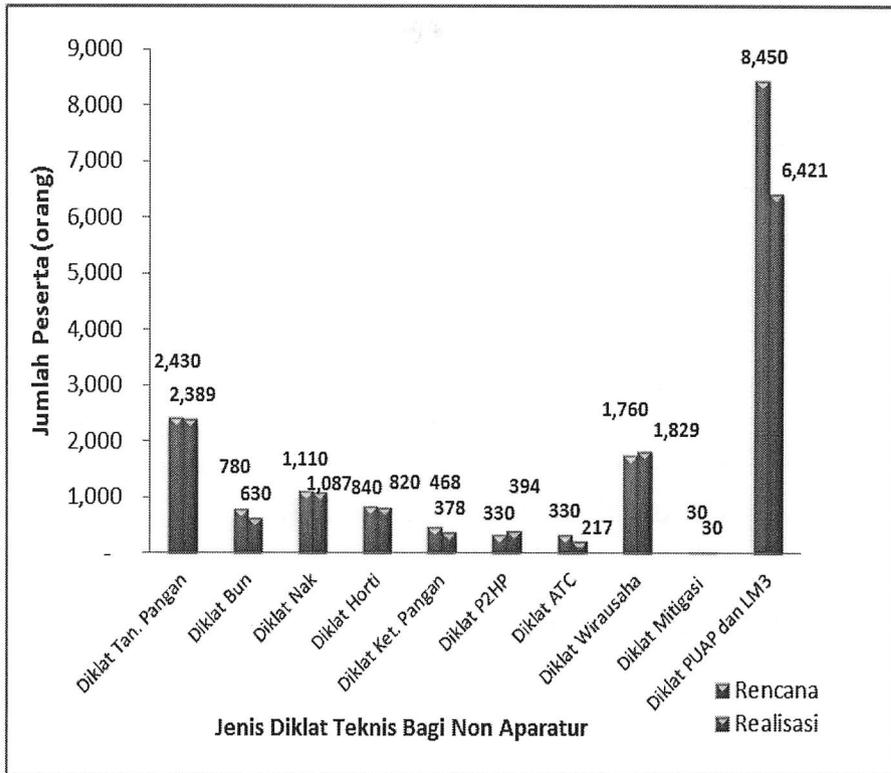
Tabel 7. Rekapitulasi Target dan Realisasi Peserta Diklat Teknis Bagi Non Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013

No.	Jenis Diklat	Rencana (Orang)	Realisasi (Orang)	%
1.	Tanaman Pangan	2.430	2.389	98,31
	a. Diklat Teknis Agribisnis Jagung	900	745	82,78
	b. Diklat Teknis Agribisnis Kedelai	750	356	47,47
	c. Diklat Teknis Agribisnis Padi	420	985	234,52
	d. Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Pangan Lainnya	360	303	84,17
2.	Perkebunan	780	630	80,77
	a. Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan Lainnya	390	391	100,26
	b. Diklat Teknis Agribisnis Tebu	390	239	61,28
3.	Peternakan	1.110	1.087	97,93
	a. Diklat Teknis Peternakan Lainnya	570	578	101,40
	b. Diklat Teknis Sapi Potong	540	509	94,26
4.	Hortikultura	840	820	97,62
	a. Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura	840	820	97,62
5.	Ketahanan Pangan	468	378	80,77
	a. Diklat Teknis Agribisnis mendukung Ketahanan Pangan	468	378	80,77
6.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	330	394	119,39
	a. Diklat Teknis Agribisnis Pengolahan dan Pemasaran Hasil	330	394	119,39
7.	Diklat Agri Training Camp (ATC)	330	217	65,76

Tabel 7. Rekapitulasi Target dan Realisasi Peserta Diklat Teknis Bagi Non Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2013 (Lanjutan)

No.	Jenis Diklat	Rencana (Orang)	Realisasi (Orang)	%
8.	Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian	1.760	1.829	103,92
	a. Diklat Bagi Petani Muda	540	308	57,04
	b. Diklat Bagi Pemuda Tani	270	376	139,26
	c. Magang di P4S	240	150	62,50
	d. Wirausaha Moral dan Etika	300	211	70,33
	e. Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Lainnya	410	784	191,22
9.	Diklat Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30	30	100,00
10.	PUAP dan LM3	8.450	6.421	75,99
	a. Diklat Bagi Pengurus Gapoktan	7.850	6.160	78,47
	b. Diklat Bagi Pengelola LM3	800	261	32,63
	Total	16.528	14.195	85,88

Target dan Realisasi Peserta Diklat Teknis Bagi Non Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Diklat Teknis Tahun 2013, ditampilkan secara grafik pada Gambar 6.



Gambar 6. Target dan Realisasi Peserta Diklat Teknis Bagi Non Aparatur Pertanian Tahun 2013

2. Meningkatnya Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian

Peningkatan kompetensi aparatur dan nonaparatur pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada (kedelai, gula, daging sapi/kerbau) dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Ketenagaan penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya sebesar 100,87% (dari target 49.282 orang tenaga penyuluh, terealisasi 49.677 orang tenaga penyuluh). Tenaga penyuluh terdiri atas penyuluh PNS sebanyak 28.462 orang (57,25%) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluhan Pertanian sebanyak 21.249 orang (42,75%).

Kinerja ketenagaan penyuluhan diukur melalui kinerja penyuluh dalam melakukan pendampingan petani di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dalam mendukung kinerja penyuluh pertanian, Kementerian Pertanian khususnya Badan PPSDMP memberikan fasilitasi dalam bentuk honor dan Biaya Operasional Penyuluhan (BOP).

3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian

Peningkatan kompetensi aparatur dan nonaparatur pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada (kedelai, gula, daging sapi/kerbau) dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Capaian indikator kinerja kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian sebesar 113,68% (dari target 2.676 orang, terealisasi 3.042 orang). Aparatur fungsional pertanian tersebut merupakan aparat yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan D4 di STPP lingkup Badan PPSDMP.

Selain menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan D4, Badan PPSDMP, khususnya Pusat Pendidikan Standardisasi

dansertifikasi profesi pertanian juga menyelenggarakan kegiatan:

14. Pendidikan formal pasca sarjana S2 dan S3, dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,13% (target 230 orang, realisasi 228 orang), terdapat 2 orang peserta tugas belajar yang mengundurkan diri;
15. Nilai capaian kinerja sertifikasi profesi SDM pertanian sebesar 93,20% (target 750 orang, realisasi 699 orang).

4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda (meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian)

Peningkatan kompetensi aparaturnonaparaturn pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada (kedelai, gula, daging sapi/kerbau) dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung); diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Capaian indikator kinerja kompetensi tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian sebesar 95,21% (target 18.230 orang, realisasi 17.357 orang). Capaian kinerja tidak mencapai target, dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran menyebabkan penurunan target jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda yang difasilitasi (penurunan target dari 18.403 orang menjadi 18.230 orang, dan terealisasi sebanyak 17.357 orang).

Kegiatan pendidikan menengah pertanian diselenggarakan melalui fasilitasi generasi muda (siswa) yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di 3 SMK-PP lingkup Badan

PPSDMP (SMK-PP Banjarbaru, SMK-PP Sembawa dan SMK-PP Kupang), dan fasilitasi kegiatan praktek kompetensi SMK-PP melalui bantuan sosial praktek siswa untuk menunjang kurikulum muatan produktif di 70 SMK-PP milik Pemda. Program studi pendidikan menengah yang diselenggarakan meliputi: program studi penyuluhan pertanian, program studi perkebunan, program studi peternakan, program studi pangan dan hortikultura.

5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani

Capaian indikator kinerja kapasitas kelembagaan petani sebesar 96,73% (dari target 10.556 unit kelembagaan petani, terealisasi 10.211 unit kelembagaan petani). Kelembagaan petani yang difasilitasi terdiri atas 9.959 unit kelompok tani (Poktan) dan 252 unit P4S. Capaian kinerja tidak mencapai target, disebabkan terbatasnya akses kelembagaan petani terhadap permodalan, pemasaran, maupun teknologi khususnya di wilayah Indonesia Timur yang lokasi tempat tinggalnya sangat berjauhan.

Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani khususnya kelompok tani dalam bentuk pemberdayaan petani, melalui:

- (a) Pengawasan dan pendampingan di lokasi SL PTT Padi;
- (b) Pengawasan dan pendampingan *demfarm* padi di lokasi swadaya murni petani;
- (c) Pengawasan dan pendampingan di lokasi sentra produksi sapi;
- (d) Pengawasan dan pendampingan di lokasi sentra produksi tebu;
- (e) Pengawasan dan pendampingan di lokasi sentra produksi hortikultura.

6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian

Capaian indikator kinerja kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian sebesar 99,27% (dari target 1.644 unit, terealisasi 1.632 unit). Secara rinci, lembaga pemerintah di bidang SDM pertanian yang difasilitasi terdiri atas:

16. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/ Bakorluh, dari target 33 unit terealisasi 33 unit.
17. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/ kota/Bapelluh, dari target 497 unit terealisasi 497 unit.
18. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan/ BP4K, dari target 1.023 unit terealisasi 1.011 unit.
19. Kelembagaan UPT Pelatihan Pertanian, dari target 10 unit terealisasi 10 unit.
20. Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dari target 1 unit terealisasi 1 unit.
21. Kelembagaan UPT Pendidikan Pertanian, dari target 7 unit terealisasi 7 unit.
22. Kelembagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-PP lingkup Badan PPSDMP dan SMK-PP Daerah), dari target 73 unit terealisasi 73 unit.

Berdasarkan aspek realisasi serapan anggaran, pencapaian realisasi rata-rata serapan anggaran Badan PPSDMP Tahun 2013 sebesar 92,00% (Rp1.234.334.984.265 dari target Rp 1.341.652.283.000,-).

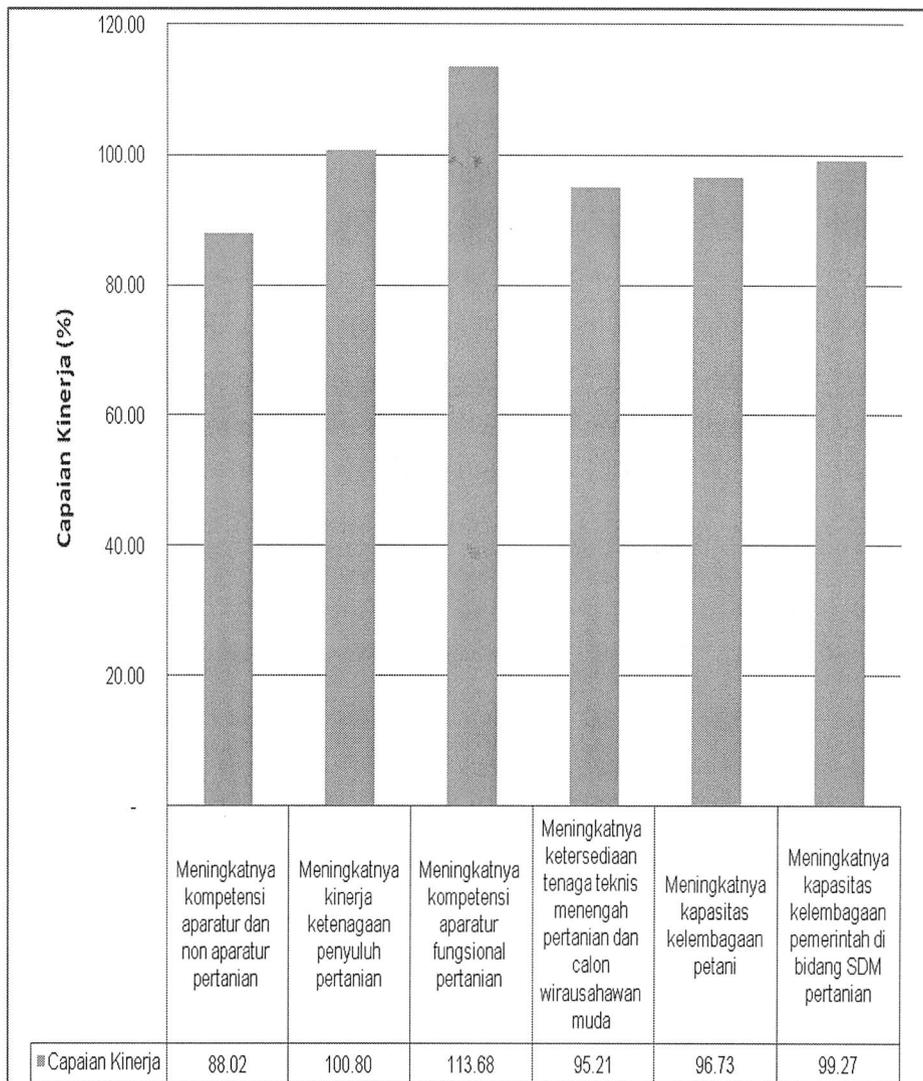
C. Analisis Kinerja

Sesuai pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), setiap eselon I mempunyai satu program

dan nama program mencerminkan nama eselon I, sehingga Badan PPSDMP mengemban Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani untuk periode tahun 2010-2014. Capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan PPSDMP dalam Penetapan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2013, dari capaian kinerja terendah (88,02%) hingga tertinggi (113,68%) adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian sebesar 88,02%;
- (2) Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda (meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian) sebesar 95,21%;
- (3) Meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani sebesar 96,73%;
- (4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian sebesar 99,27%;
- (5) Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian sebesar 100,80%; dan
- (6) Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian sebesar 113,68%.

Persentase Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2013 berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013 secara grafik ditampilkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Persentase Capaian Kinerja Badan PPSDMP berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013

Berdasarkan aspek keuangan, jumlah alokasi anggaran Badan PPSDMP melalui Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani tahun 2013 mengalami penurunan, dari Rp1.434.295.529.000,- menjadi Rp1.341.652.283.000,-, dikare-

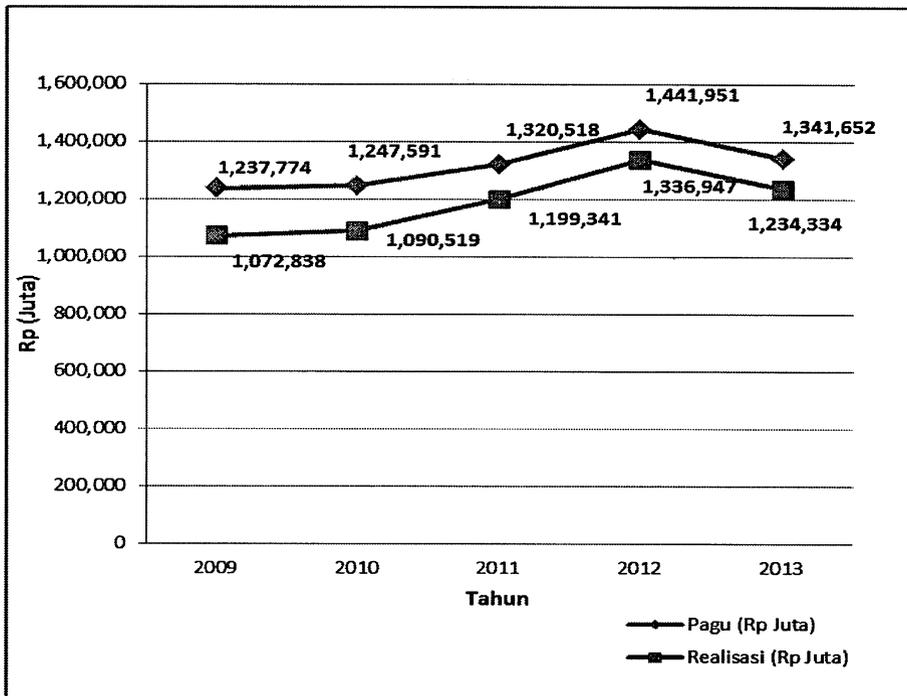
nakan adanya kebijakan penghematan anggaran. Realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar **Rp1.234.334.984.265,- (92,00%)**.

Apabila dibandingkan dengan realisasi serapan tahun 2012, realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,72% (92,72% pada tahun 2012). Jika dibandingkan realisasi serapan tahun-tahun sebelumnya, realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP menunjukkan peningkatan selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2009 hingga 2012. Realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP selama 5 tahun terakhir (tahun 2009 s.d. 2013) tampak pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2009-2013

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2009	1.237.774.000.000	1.072.838.080.000	86,67
2010	1.247.591.158.000	1.090.519.431.208	87,41
2011	1.320.518.142.000	1.199.341.659.670	90,67
2012	1.441.951.871.000	1.336.947.447.259	92,72
2013	1.341.652.283.000	1.234.334.984.265	92,00

Perkembangan realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP tahun 2009 s.d 2013 secara grafik disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran Badan PPSDMP tahun 2009 - 2013

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja diukur dengan cara membandingkan antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran dengan besarnya masukan/*input* yang digunakan (proporsi *output/input*). Capaian kinerja dinilai efisien jika nilai rasio *output* dibandingkan dengan *input* mencapai 1 atau lebih dari 1.

Capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 (Tabel 5) menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 98,95% (*output*), sedangkan nilai rata-rata capaian

realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar 92,00% (*input*), sehingga efisiensi capaian indikator kinerja (proporsi *output/input*) sebesar **1,08** (98,95% berbanding 92,00%). Capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar 1,08 (lebih dari 1), sehingga termasuk kategori **efisien**.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis Badan PPSDMP tahun 2013, sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi SDM pelatihan (widyaiswara dan ketenagaan pelatihan lainnya);
2. Belum optimalnya eselon I teknis lingkup Kementan dalam pemanfaatan UPT Pelatihan lingkup Badan PPSDMP;
3. Belum optimalnya pengembangan jejaring kerjasama lintas sektor;
4. Minimnya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan diklat;
5. Belum terselesaikannya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP;
6. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) belum sesuai pedoman yang berlaku;
7. Pemberdayaan petani melalui metode Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) belum optimal dikarenakan belum optimalnya pengawalan dan pendampingan SL-PTT; dan
8. Kegiatan pengawalan dan pendampingan SL-PTT belum optimal dikarenakan mundurnya musim tanam akibat keterlambatan ketersediaan air dan benih.

Menyikapi kondisi tersebut, rekomendasi Badan PPSDMP sebagai langkah antisipasi yang harus dilakukan di tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui kegiatan pelatihan dan magang, baik dalam maupun luar negeri;
2. Sinkronisasi kegiatan pelatihan dengan Eselon I teknis lingkup Kementan dalam identifikasi diklat teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
3. Pengembangan jejaring kerjasama lintas sektor melalui koordinasi dengan pemda dalam bentuk kegiatan apresiasi di wilayah kerja UPT Pelatihan Pertanian, kerjasama luar negeri melalui magang bagi petani muda di Jepang, *ASEAN exchange farmers, Training in Corn Production and Processing for ASEAN*, dan training bagi widyaiswara;
4. Pemenuhan anggaran prasarana dan sarana sesuai dengan standar minimal prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian, melalui kerjasama penyelenggaraan diklat, pendayagunaan ketenagaan diklat dan pemanfaatan sarana prasarana diklat;
5. Peningkatan sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dengan Eselon I teknis terkait dalam identifikasi kebutuhan latihan;
6. Perpanjangan MoU antara Menteri Pertanian (Kepala Badan PPSDMP) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Menengah) dalam bentuk kerjasama teknis Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP;
7. Peningkatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi BP3K kepada pelaksana/pengelola kegiatan fasilitasi BP3K; dan
8. Peningkatan koordinasi antara kabupaten (selaku pelaksana kegiatan) dengan provinsi (selaku satker pengelola dana

dekonsentrasi); dan peningkatan koordinasi dengan dinas pertanian yang menangani SL-PTT guna percepatan penyediaan saprodi dan benih.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban oleh Badan PPSDMP selama tahun 2013. Pada tahun 2013, sasaran strategis Badan PPSDMP terangkum kedalam enam sasaran strategis yang dipayungi oleh Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.

Berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, nilai rata-rata capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar 98,95% (*output*). Kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 berada pada **kisaran 88,02% hingga 113,68%**. Capaian kinerja terendah diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, sedangkan capaian kinerja tertinggi diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian.

Realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar **92,00%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi serapan tahun 2012, realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,72% (92,72% pada tahun 2012).

Tingkat efisiensi capaian indikator kinerja Badan PPSDMP berdasarkan proporsi *output/input* adalah sebesar **1,08** yang berarti berada pada **kategori efisien**. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai rata-rata capaian kinerja fisik (98,95%) dengan nilai rata-rata realisasi keuangan (92,00%).

Beberapa permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis Badan PPSDMP tahun 2013, adalah: (1) Rendahnya kompetensi

SDM pelatihan (widyaiswara dan ketenagaan pelatihan pertanian); (2) Belum optimalnya Eselon I teknis lingkup Kementan dalam pemanfaatan UPT Pelatihan lingkup Badan PPSDMP; (3) Belum optimalnya pengembangan jejaring kerjasama lintas sektor; (4) Minimnya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan diklat; (5) Belum terselesaikannya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP; (6) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Balai Penyuluhan belum sepenuhnya berjalan sesuai pedoman yang berlaku; (7) Kegiatan pengawalan dan pendampingan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) belum optimal dikarenakan mundurnya musim tanam akibat keterlambatan ketersediaan air dan benih; dan (8) Pemberdayaan petani melalui metode SL-PTT belum terlaksana secara optimal dikarenakan belum optimalnya pengawalan dan pendampingan SL-PTT.

Menyikapi kondisi tersebut, rekomendasi Badan PPSDMP sebagai langkah antisipasi yang harus dilakukan di tahun mendatang adalah: (1) Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui kegiatan pelatihan dan magang, baik dalam maupun luar negeri; (2) Sinkronisasi kegiatan pelatihan dengan Eselon I teknis lingkup Kementan dalam identifikasi diklat teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; (3) Pengembangan jejaring kerjasama lintas sektor melalui koordinasi dengan pemda dalam bentuk kegiatan apresiasi di wilayah kerja UPT Pelatihan Pertanian, kerjasama luar negeri melalui magang bagi petani muda di Jepang, *ASEAN exchange farmers, Training in Corn Production and Processing for ASEAN*, dan training bagi widyaiswara; (4) Pemenuhan anggaran prasarana dan sarana sesuai dengan standar minimal prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian, melalui kerjasama penyelenggaraan diklat,

pendayagunaan ketenagaan diklat dan pemanfaatan sarana prasarana diklat; (5) Peningkatan sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dengan Eselon I teknis terkait dalam identifikasi kebutuhan latihan; (6) Perpanjangan MoU antara Menteri Pertanian (Kepala Badan PPSDMP) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Menengah) dalam bentuk kerjasama teknis Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP; (7) Peningkatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi BP3K kepada pelaksana/pengelola kegiatan fasilitasi BP3K; dan (8) Peningkatan koordinasi antara kabupaten (selaku pelaksana kegiatan) dengan provinsi (selaku satker pengelola dana dekonsentrasi); dan peningkatan koordinasi dengan dinas pertanian yang menangani SL-PTT guna percepatan penyediaan saprodi dan benih.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

**Penetapan Kinerja
Badan PPSDMP Tahun 2013**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 78839233
SITUS : www.bpsdmp.deptan.go.id

PENETAPAN KINERJA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN TAHUN 2013

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Suryana
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suswono
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2013

Pihak Kedua,

Suswono

Pihak Pertama,

Achmad Suryana

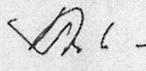
PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pelatihan	1. Kompetensi aparatur di sektor pertanian	19 043 Orang
	2. Kompetensi non aparatur di sektor pertanian	16 528 Orang
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	Kinerja ketenagaan penyuluh pertanian	49 282 Orang
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian	Kompetensi aparatur fungsional pertanian	2 676 Orang
4. Meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda	Kompetensi Tenaga teknis menengah dan calon wirausaha muda pertanian	18 403 Orang
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	Kapasitas kelembagaan petani	10 556 Unit
6. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian	Kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian	3 028 Unit

Jumlah anggaran:
 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
 Rp. 1.434.295.529.000,-.

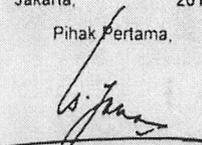
Pihak Kedua,



 Suswono

Jakarta, 2013

Pihak Pertama,



 Achmad Suryana

Lampiran 2.

**Struktur Organisasi
Badan PPSDMP**



**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertama (BPPSDMP)
Kementerian Pertanian
Jakarta, 2014**